

PENGUATAN MODAL SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PENGELOLAAN AGROEKOSISTEM LAHAN KERING

Studi Kasus di Desa-desa (Hulu DAS) Ex Proyek Bangun Desa, Kabupaten
Gunungkidul dan Ex Proyek Pertanian Lahan Kering, Kabupaten Boyolali

Tri Pranadji

*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161*

ABSTRACT

The objective of this study is to formulate the enhancement model of social capital in social empowerment to improve the upland agro-ecosystem (UAE) management in rural areas. The hypothesis in this study is that the empowerment of the rural society will not succeed if it is not founded upon the enhancement of local social capital. The important and strategic elements of social capital are value system, Human resources or human competence, social management, social organization, social structure, leadership, and good governance. The study was carried out through direct field observations in the following rural areas: (1) ex-Upland Agriculture Conservation Project (UACP/P2LKT) in upstream of Jratunseluna WA, and (2) ex-Bangun Desa Project (BDP) in upstream of Bengawan Solo WA. Some important findings are: *First*, in the villages where the UAE damage is relatively high, the larger part of the population has the difficulty to satisfy their basic needs. *Second*, in the improvement of UAE management, both UACP and BDP did not succeed in the enhancement of local social capital. After the two projects terminated, almost all of the introduced innovations, at the same time, tended to cease. The village with greater social capital, such as Kedungpoh (ex-BDP), has a better capacity to alleviate UAE damage. *Third*, inequity of the strength of social capital among the hamlets within a village can be used as an indicator of the weakness of the rural society in the management of UAE, and also the weakness of civil society and rural governance. *Fourth*, the damage of the value system elements of the rural society is the determining factor for social backwardness and the decline of the quality of UAE management. Efforts to improve the UAE management in the future should be developed not only parallel with the empowerment of local rural society, but also integrated with the transformation of socio-cultural and rural economy. The effective empowerment model in the management of UAE should be founded upon the enhancement of local social capital. Enhancement of progressive values represents the core of enhancement of social capital, and it will be more effective if supported by better quality of local leadership, social management, and social organization at the hamlet level.

Key words: *cultural values, empowerment, model, rural society, social capital, upland agro-ecosystem*

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah merumuskan model penguatan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat untuk perbaikan pengelolaan agroekosistem lahan kering (ALK) di pedesaan. Hipotesa penelitian adalah bahwa pemberdayaan masyarakat pedesaan tidak akan berhasil jika tidak dilandaskan pada penguatan modal sosial setempat. Elemen modal sosial yang dinilai penting adalah tata nilai, kompetensi SDM, manajemen sosial, keroganisasian masyarakat, struktur sosial, kepemimpinan, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Melalui analisis perbandingan dan pengamatan langsung terhadap desa-desa ex Proyek Pertanian Lahan Kering (P2LK) di Hulu DAS Jratunseluna, dan ex Proyek Bangun Desa (PBD) di Hulu DAS Bengawan Solo, diperoleh beberapa temuan: *pertama*, pada desa yang kerusakan ALK parah, sebagian besar penduduknya mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. *Kedua*, dalam memperbaiki pengelolaan ALK, kedua proyek belum memperhatikan tentang pentingnya penguatan modal sosial setempat. Setelah proyek berakhir, hampir semua kegiatan perbaikan pengelolaan ALK ikut berakhir. Desa yang memiliki modal sosial relatif baik cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam mengatasi kerusakan ALK. *Ketiga*, ketimpangan kekuatan modal sosial antardukuh bisa dijadikan petunjuk kemungkinan terjadinya gejala ketidakberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ALK, dan sekaligus menjadi petunjuk tentang lemahnya kelembagaan masyarakat madani dan penyelenggaraan pemerintahan pedesaan setempat. *Keempat*, kerusakan tata nilai masyarakat pedesaan merupakan faktor penting penyebab terjadinya ketidak-berdayaan masyarakat dan kemerosotan pengelolaan ALK setempat. Upaya perbaikan pengelolaan ALK tidak saja perlu disejajarkan dengan pemberdayaan masyarakat, namun juga perlu diintegrasikan dengan transformasi sosio-budaya dan perekonomian pedesaan. Model pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam pengelolaan ALK yang dinilai efektif adalah yang dilandaskan pada penguatan modal sosial setempat. Penguatan tata nilai kemajuan merupakan inti dari penguatan modal sosial, dan akan efektif jika dimulai dari penguatan kepemimpinan masyarakat setempat, manajemen sosial, dan keorganisaian masyarakat tingkat dukuh.

Kata kunci: *model, modal sosial, tata nilai, pemberdayaan, masyarakat pedesaan, agroekosistem lahan kering*

PENDAHULUAN

Kerusakan agroekosistem lahan kering (ALK) di pedesaan Jawa dewasa ini sudah pada tingkat sangat mengkhawatirkan. Gejala kerusakan ALK sebenarnya telah mulai dirasakan paling tidak sejak satu setengah abad lalu. Diperkirakan kerusakan ALK di pedesaan Jawa ini didahului oleh melemahnya atau rusaknya kekuatan modal sosial atau budaya setempat. Oleh sebab itu, mengikuti pandangan Parasuraman (2004), upaya untuk memperbaiki kembali pengelolaan ALK di Jawa tidak bisa hanya dengan mengandalkan (misalnya) pengenalan teknologi usahatani konservasi (TUK) atau penerapan pengetahuan ekologi yang terpisah dari pemberdayaan masyarakat pedesaan setempat. Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan modal sosial (berbasis

penguatan nilai-nilai budaya) setempat harus dipandang sebagai bagian utama dari perbaikan model pengelolaan ALK di pedesaan Jawa.

Jika penguatan modal sosial hanya dianggap sebagai pengembangan jaringan hubungan (fisik) antara komponen kepercayaan (*trust*), jaringan hubungan kerja (*net-work*), dan kerja sama (*cooperation*), sebagaimana banyak dikemukakan oleh kalangan pakar (ekonomi) di negara maju. Hal ini dinilai masih relatif superfisial dan belum menyentuh langsung akar atau inti dari penguatan modal sosial itu sendiri. Inti modal sosial adalah nilai-nilai budaya. Penguatan modal sosial perlu diawali dari penguatan nilai-nilai budaya setempat. Selain nilai-nilai budaya, elemen modal sosial yang dinilai penting dikembangkan dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan adalah kompetensi SDM atau sumberdaya manusia (*human capital*), manajemen sosial dan keorganisasian masyarakat madani (*civil society*) yang kuat, struktur sosial yang tidak timpang, kepemimpinan lokal yang kuat, sistem moral dan hukum yang kuat, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Lahan kering adalah bagian dari ekosistem terestrial (Odum, 1971), dan merupakan hamparan lahan yang tidak pernah digenangi atau tergenang air pada sebagian besar waktu selama setahun (Hidayat dkk, 2000). Pemanfaatan agroekosistem lahan kering (ALK) untuk usaha pertanian tanaman semusim sudah hampir merata di Jawa, termasuk di daerah perbukitan dan bagian hulu DAS. Banyak ditemukan bahwa ALK di daerah perbukitan dan bagian hulu DAS di Jawa dewasa ini telah mengalami kerusakan hebat. Kerusakan ALK ini bukan saja telah menyulitkan kehidupan masyarakat pedesaan setempat, melainkan juga telah mendatangkan kerugian sosial, ekonomi, budaya dan politik bagi masyarakat bagian hilir yang relatif besar. Dari tahun ke tahun kerugian ini diperkirakan terus meningkat.

Upaya perbaikan pengelolaan bagian hulu DAS di Jawa saat ini sudah sangat mendesak. Pemerintah sebenarnya telah melakukan beberapa upaya yang dimaksud, namun hasilnya dinilai masih jauh dari harapan. Sejak 2-3 abad lalu (de Graaf dan Pigeaud, 2001), kerusakan ALK di Jawa telah menjadi bagian “sejarah buram” pengelolaan sistem pertanian menetap di Pedesaan Jawa (Lombart, 2000; Thijssen, 1982; Geertz, 1983; Reid, 2004). Kerusakan ini bukan saja akibat lemahnya kemampuan petani atau masyarakat pedesaan dalam pengelolaan ALK, melainkan (yang perlu lebih diperhatikan) adalah ketidaktepatan kebijakan pemerintah dalam membangun model pemberdayaan masyarakat pedesaan setempat.

Kesadaran tentang pentingnya menjaga ALK di perbukitan sebagai “dapur kehidupan” masyarakat Jawa telah berkembang sejak akhir abad 18. Kesadaran tersebut dalam kenyataan belum bisa dijadikan “energi” untuk melakukan pengelolaan ALK yang baik. Kenyataan yang terjadi di lapangan justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Pengelolaan ALK di pedesaan yang masih buruk tidak cukup dipandang hanya sebagai masalah kurangnya penerapan pengetahuan dan teknologi usahatani konservasi (TUK) di tingkat

petani. Pengelolaan ALK juga harus dipandang sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat melalui penguatan modal sosial, dan keberhasilannya harus dapat ditunjukkan melalui perbaikan tingkat kehidupan masyarakat setempat. Jika tata-nilai atau *human values* (Odum, 1971) tidak dianggap sebagai bagian penting dari perbaikan pengelolaan ALK di pedesaan, maka peluang kegagalannya diperkirakan relatif besar. Istilah moral dan etika lingkungan, yang dikemukakan Keraf (2002), sedikit banyak berkaitan dengan tata-nilai, dan hal ini dapat dipandang sebagai inti penguatan modal sosial. Jika penguatan modal sosial setempat tidak terwujud melalui perbaikan tata-nilai, maka hal itu dapat dinilai sebagai kunci kegagalan upaya perbaikan dalam pengelolaan ALK di pedesaan.

Pemanfaatan lahan di Jawa dalam beberapa dekade terakhir termasuk salah satu yang paling spektakuler di Asia Timur. Sejak tiga per empat abad lalu Thijssen (1982) dan Pelzer (1982) mengingatkan bahwa kerusakan ALK daerah hulu DAS di Jawa, terutama daerah perbukitan di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sudah mencapai tingkat sangat serius. Kerusakan agroekosistem atau degradasi lahan sangat mungkin bertali-temali dengan lingkaran kemiskinan yang tak berujung atau "*poverty trap*" (Prakash, 1997 dan 2000; dan Scherr and Yadav, 1996). Modal sosial dan budaya setempat, yang bisa menjadi kunci pembuka (*master keys*) (Kliksberg, 1999) untuk mengatasi kerusakan ALK, hingga kini masih belum mendapat perhatian yang memadai. Semakin melemahnya sejumlah elemen tata-nilai bisa dijadikan sebagai gambaran bahwa harapan terhadap penguatan modal sosial setempat semakin sulit dicapai.

Kostov and Lingrad (2001) menyatakan bahwa pembangunan pedesaan di masa datang memerlukan pendekatan baru. Penguatan modal sosial dalam pembangunan pedesaan dapat dinilai sebagai pembaruan pendekatan yang sangat penting. Jika pembangunan pedesaan tidak disertai dengan penguatan lembaga dan organisasi (Tjondronegoro, 1977), partisipasi masyarakat terbanyak di pedesaan (Sajogyo, 1974), dan pemberdayaan ekonomi rakyat (Mubyarto, 2002), maka apapun program atau proyek pembangunan pedesaan yang dijalankan pemerintah, termasuk perbaikan pengelolaan ALK di pedesaan, akan sulit mencapai hasil yang diharapkan.

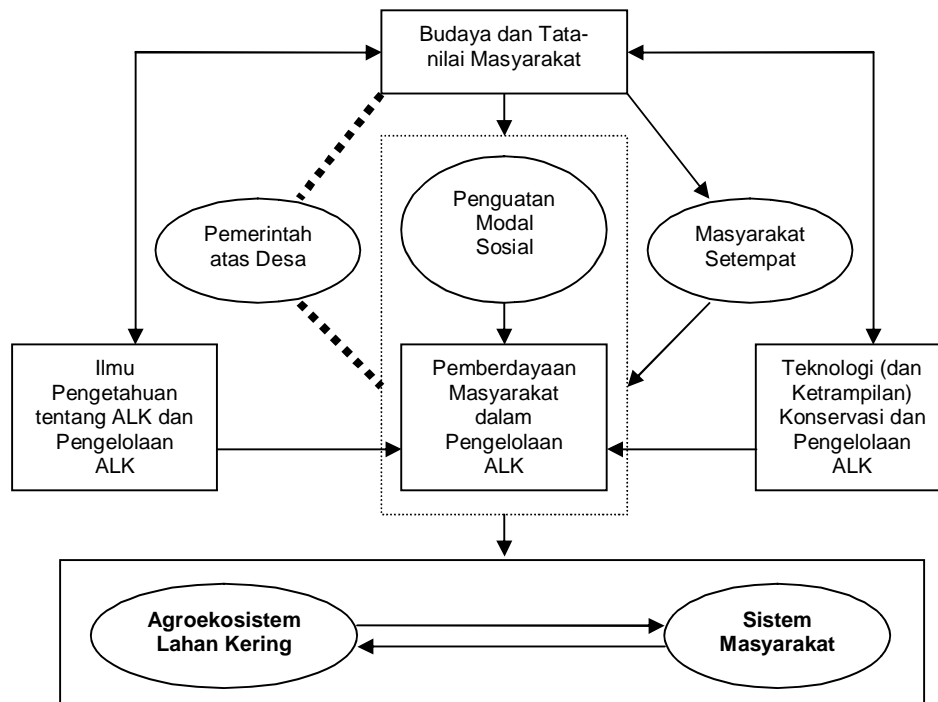
Pengembangan pengetahuan baru tentang pengelolaan ALK di pedesaan, yang memasukkan modal sosial sebagai faktor kunci pemberdayaan masyarakat pedesaan, saat ini dinilai sudah sangat mendesak. Keberhasilan dan kegagalan penerapan model pengelolaan ALK, terutama Proyek Pertanian Lahan Kering dan Konservasi Tanah atau P2LK (DAS Jratunseluna di Boyolali) dan Proyek Bangun Desa atau PBD (DAS Bengawan Solo di Gunungkidul) yang dijalankan pemerintah dalam kurun 10-20 tahun terakhir, bisa dijadikan bahan penelitian empirik yang sangat berharga. Penelitian ini merupakan bagian dari hasil kerja dan pengamatan lapangan di desa-desa di Kabupaten Boyolali (P2LK), dan Kabupaten Gunungkidul (PBD).

Tujuan penelitian ini adalah merumuskan model penguatan modal sosial dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan agar pengelolaan ALK dapat mendukung pembangunan pedesaan berkelanjutan. Tujuan penelitian secara rinci adalah: (1) menjelaskan adanya hubungan erat antara kerusakan ALK dan melemahnya modal sosial setempat; (2) menganalisis pengaruh penerapan model pengelolaan ALK yang dikembangkan pemerintah terhadap tingkat kehidupan dan cara masyarakat pedesaan setempat dalam mengeksploitasi, memelihara dan memperbaiki ALK melalui pengembangan kegiatan pertaniannya; (3) menganalisis elemen modal sosial, dilandaskan pada nilai-nilai budaya, manajemen sosial, kepemimpinan, penyelenggaraan pemerintahan desa, solidaritas dan jaringan kerja gotong royong, yang dinilai strategis dalam pengembangan model pemberdayaan masyarakat pedesaan untuk perbaikan pengelolaan ALK di pedesaan secara berkelanjutan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Gambar 1 merupakan model atau kerangka sederhana untuk melihat hubungan yang erat antara penguatan modal sosial dan pengelolaan ALK di pedesaan. Model pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam pengelolaan ALK dapat dikembangkan dengan menggunakan kerangka pemikiran sederhana seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Terlihat bahwa budaya atau tata-nilai masyarakat menjadi penentu ke arah mana, dengan landasan pengetahuan, dan dengan cara atau teknologi seperti apa suatu kegiatan pengelolaan ALK dilakukan. Model perbaikan dalam pengelolaan ALK tidak bisa semata-mata dipandang sebagai obyek material pemberdayaan masyarakat pedesaan, melainkan perlu dipandang juga sebagai subyek material dan budaya. Keberhasilan pengelolaan ALK di pedesaan, dengan demikian, sangat ditentukan oleh penguatan budaya atau tata-nilai dalam bentuk modal sosial di pedesaan.

Model pengelolaan ALK yang dikembangkan pemerintah selama ini masih lebih menekankan pada pemberian bantuan fisik pada petani dan pengenalan melalui kegiatan percontohan fisik di lapangan. Aspek penguasaan pengetahuan dan teknologi usahatani konservasi (TUK) di tingkat petani, sebelum dilakukan pengenalan model pengelolaan ALK, memang dinilai masih belum memadai. Pembekalan pada tenaga penyuluh lapang lebih diutamakan pada penguasaan pengetahuan dan TUK dibanding materi untuk penguatan modal sosial setempat. Secara teoritis bisa ditunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ALK yang dilakukan pemerintah atas desa sedikit sekali (atau sama sekali) memperhitungkan penguatan modal sosial setempat. Dinamika dan penguatan modal sosial dalam pengelolaan ALK akan ditentukan oleh kekuatan budaya dan tata-nilai yang hidup di masyarakat setempat.

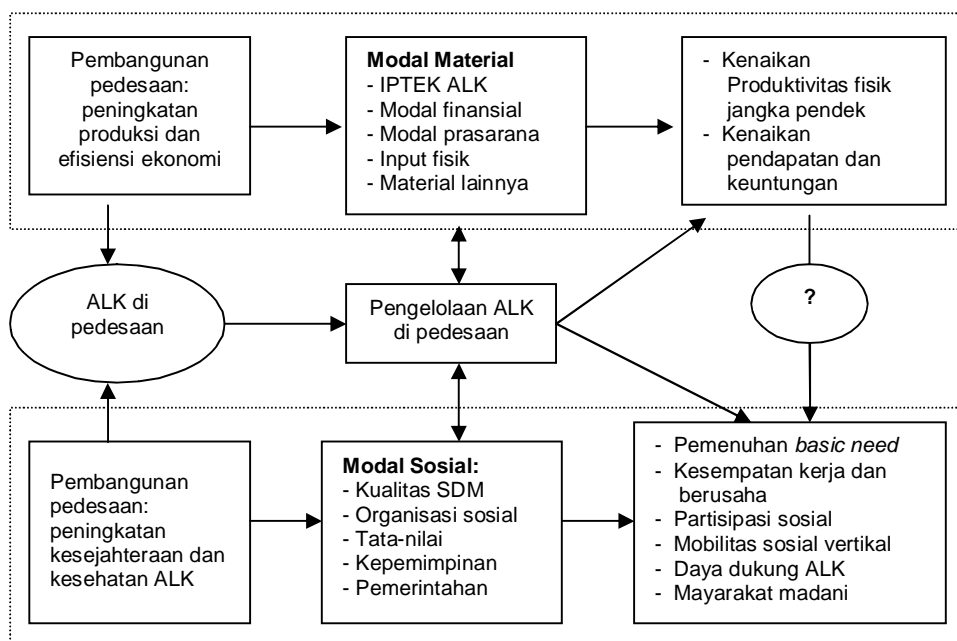


Gambar 1. Model Hubungan antara Budaya dan Tata-nilai, Penguatan Modal Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan ALK. Diadaptasi dari pemikiran Odum (1971), Merton (1962), Altiery *et al.* (1997), Rambo (1982), Rachman (1996), dan Lewis *et al.* (1997).

Dalam Gambar 1 juga dapat ditunjukkan bahwa pengelolaan ALK tidak semata-mata melihat ALK sebagai obyek pasif. Keberadaan ALK di pedesaan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sistem masyarakat setempat. Artinya, dalam pengelolaan ALK termuat aspek pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam perspektif pembangunan pedesaan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat yang diterjemahkan dalam bentuk pemberian bantuan dan pengetahuan fisik pada masyarakat pedesaan hanya sesuai pada tahap pengenalan awal. Dengan kata lain, pendekatan pemberdayaan semacam ini yang dilakukan secara terus-menerus oleh petugas pemerintah bukan saja akan membuat partisipasi masyarakat pedesaan menjadi sangat dangkal (*shallow participation*, Malvicini and Sweetser, 2003), melainkan juga hal itu tidak akan mempunyai pengaruh positif terhadap penguatan modal sosial setempat.

Pada Gambar 2 diperlihatkan bahwa pengelolaan ALK di pedesaan merupakan bagian dari pembangunan pedesaan berkelanjutan. Pengelolaan ALK adalah pengembangan lebih lanjut dari pemberdayaan masyarakat

pedesaan setempat, yang di dalamnya mengintegrasikan kekuatan modal material dan modal sosial setempat. Pada bujur sangkar bagian atas diperlihatkan bahwa tanpa penguatan modal sosial di pedesaan, pengelolaan ALK lebih menitik-beratkan pada pendekatan produksi dan efisiensi ekonomi. Aspek kesejahteraan masyarakat dan daya dukung ALK, yang merupakan bagian utama dari perbaikan kehidupan masyarakat pedesaan, belum mendapat perhatian yang memadai. Pengelolaan ALK seperti ini dinilai tidak sejalan dengan tujuan pembangunan masyarakat pedesaan.



Gambar 2. Kerangka Hubungan antara Modal Sosial, Material, dan Pengelolaan ALK dalam Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan.

Pada bujur sangkar bagian bawah (Gambar 2) menunjukkan pengelolaan ALK dengan pendekatan kesejahteraan masyarakat dan penyehatan ALK setempat. Pengelolaan ALK dengan pendekatan ini dinilai lebih mendekati konsep pembangunan pedesaan berkelanjutan. Penguatan modal sosial menjadi bagian utama dari pendekatan ini. Model pemberdayaan masyarakat dengan memasukkan aspek modal sosial dan terbentuknya masyarakat madani (*civil society*) dinilai akan memberikan hasil yang lebih baik, terutama dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau pembangunan pedesaan secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ini tidak semata-mata hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, melainkan (yang lebih penting) berorientasi pada pencapaian kesejahteraan

masyarakat dalam arti lebih luas dan berkelanjutan. Makna peningkatan kesejahteraan perlu ditunjukkan melalui pencapaian perbaikan tingkat kehidupan masyarakat pedesaan. Indikatornya antara lain dapat dilihat dari ada atau tidaknya peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, partisipasi sosial, mobilitas vertikal, daya dukung ALK dan pembentukan masyarakat madani (*civil society*) di pedesaan secara signifikan.

METODA PENELITIAN

Model Pemberdayaan

Program yang diperkenalkan pemerintah pada masyarakat pedesaan dalam bentuk proyek pengembangan ALK di perbukitan disebut model pengelolaan ALK berbasis (pemberdayaan) masyarakat pedesaan. Proyek pengembangan ALK tersebut bisa disebut juga sebagai model pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam pengelolaan ALK. Disebut model pemberdayaan masyarakat pedesaan karena dalam tujuan program pemerintah tersebut terdapat penekanan bahwa nantinya masyarakat pedesaan setempatlah yang menjadi pelaku utama atau pelanjut kegiatan pengelolaan ALK. Jika masyarakat pedesaan, setelah proyek atau program pemerintah berakhir, tidak mampu menjadi pelanjut yang baik dalam pengelolaan ALK, maka model pengelolaan ALK dinilai tidak berhasil memberdayakan masyarakat setempat. Dengan kata lain, bahwa jika proyek atau program pemberdayaan masyarakat pedesaan dari atas berakhir maka berakhir pula keberdayaan masyarakat sasaran dalam mengelola ALK sesuai dengan petunjuk teknis dari atas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penganalisaan secara *cross section*. Dua model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ALK diamati secara bersamaan dan dengan menggunakan indikator yang sama. Penganalisaan terhadap dua model pemberdayaan masyarakat, dengan cara membandingkan antara model satu dan model lainnya, dimaksudkan untuk mempertajam penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing model. Model pertama dikenal sebagai *Up-land Agriculture and Conservation Project* (UACP) di DAS Hulu Jratunseluna (di Boyolali, Jawa Tengah), atau bisa disebut P2LK; sedangkan model lainnya adalah Proyek Bangun Desa (di Gunungkidul, D.I. Yogyakarta), atau bisa disebut PBD. Dikaitkan dengan tujuan penelitian, perbedaan kedua model pemberdayaan masyarakat, yang di dalamnya terdapat penekanan pada penguatan modal sosial setempat, secara ringkas dapat ditunjukkan pada Tabel 1.

Lokasi Penelitian dan Responden

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif. Setiap lokasi provinsi atau kabupaten yang dipilih dianggap mewakili satu model pember-

dayaan masyarakat pedesaan dalam pengelolaan ALK. Pertimbangannya bahwa di lokasi tersebut pernah dilakukan kegiatan rehabilitasi atau perbaikan pengelolaan ALK secara besar-besaran dan dalam kurun waktu sekitar 5 tahun atau lebih. Penelitian dilakukan di dua lokasi (kabupaten), yaitu: *pertama* adalah Kabupaten Boyolali, mewakili daerah ex proyek pertanian konservasi dan pertanian lahan kering (P2LK) atau UACP (*Up-land Agricultural and Conservation Project*), didanai dengan bantuan USAID; Adimihardja dkk, 2000). Lokasi di wilayah ini dikenal sebagai hulu DAS Jratunseluna (Sungai Jragung, Tuntang, Serang, Lusi, dan Juana). *Kedua*, adalah Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan bagian dari Hulu DAS Bengawan Solo. Wilayah ini mewakili Proyek Bangun Desa atau PBD, yang didanai dengan bantuan Bank Dunia.

Tabel 1. Beberapa Perbedaan Aspek Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Mencakup Penguatan Modal Sosial Setempat, Menurut Masing-masing Model dalam Pengelolaan ALK di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

Komponen Model Pemberdayaan	P2LK-Boyolali (Jawa Tengah)	PBD-Gunungkidul (D.I. Yogyakarta)
Lokasi sub-DAS hulu	Jratunseluna, Boyolali	Bengawan Solo, Gunungkidul
Kegiatan utama yang menonjol	Pengembangan teknologi usahatani konservasi	Pertanian dan ekonomi rumah tangga petani
Sebaran masyarakat pedesaan yang dijadikan sasaran	Petani, pengrajin rumah tangga dan masyarakat desa	Petani, pengrajin, pelaku ekonomi nonpertanian dan masyarakat desa
Prasarana pendukung	Kurang memadai	Relatif lebih memadai
- Pasar	- Relatif kecil	- Relatif besar
- Jalan	- Relatif sedikit	- Relatif banyak
- Alat transportasi	- Relatif sedikit	- Relatif banyak
Program peningkatan partisipasi masyarakat	Relatif kecil dan kurang beragam	Relatif besar dan cukup beragam
Intensitas dan keberlanjutan penyuluhan pertanian	Relatif kurang intensif dan tidak berlanjut	Relatif intensif dan tampak berlanjut
Kepemimpinan lokal	Relatif lemah	Relatif kuat
Solidaritas dan kohesivitas social setempat	Lemah dan kurang berkembang	Cukup kuat dan berkembang
Manajemen dan keorganisasian masyarakat	Relatif lemah dan belum berkembang	Relatif kuat dan berkembang sehat
Kepercayaan diri dan kewirausahaan lokal	Relatif rendah dan kurang berkembang	Relatif tinggi dan cukup berkembang
Penyelenggaraan pemerintahan desa	Relatif kurang baik dan kurang diterima masyarakat	Relatif baik dan diterima masyarakat
Penguatan modal sosial di pedesaan	Relatif kecil	Relatif besar

Keterangan: Diolah dari hasil wawancara

Unit lokasi pengamatan adalah desa. Untuk mengamati kekhasan kekuatan modal sosial, dalam satu desa dipilih dua dukuh, sehingga secara keseluruhan didapatkan 8 dukuh contoh).

Sebagai penelitian sosial (Poplin, 1979), metoda yang digunakan adalah dengan melakukan pengamatan langsung terhadap masyarakat dan berbagai kejadian di lapangan. Pengambilan contoh (responden) dilakukan secara berjenjang, dari tingkat provinsi hingga dukuh/desa. Katagori responden meliputi aparat pemerintah, tokoh masyarakat, mantan aparat pemerintah, penyuluh dan mantan petugas lapangan proyek, pengrajin dan pedagang, petani, pakar, dan pengamat lapangan.

Waktu Penelitian dan Analisis Data

Waktu penelitian dilakukan dalam kurun 3 (tiga) tahun, dimulai 1999 dan berakhir 2001. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan ilmu-ilmu sosial, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pengamatan dan pengumpulan data di lapangan dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk pengamatan dengan bantuan daftar pertanyaan tertutup peneliti dibantu 4-6 enumerator terlatih.

Penganalisaan dilakukan dengan metoda deskriptif (antara lain dengan tabulasi silang dua arah). Kerangka analisis yang digunakan adalah dengan memperbandingkan sejumlah indikator atau peubah yang terkait dengan pengelolaan ALK gejala keterbelakangan, alokasi pendapatan (untuk modal sosial dan nonmodal sosial), dan elemen modal sosial tertentu pada keempat desa contoh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modal Alam dan Prasarana

Sebagian besar modal alam (*natural capital*) pada keempat desa contoh berupa lahan kering (>80%), dan sebagian besar penggunaannya untuk usaha pertanian. Kecuali hanya pada sebagian kecil lahan sawah, usaha pertanian di keempat desa contoh masih sangat tergantung pada musim. Ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga pada dua desa contoh di Kabupaten Boyolali (Desa Gunungsari dan Gondanglegi), khususnya pada musim kemarau, dewasa ini masih sulit. Dahulu gambarannya tidak sesulit sekarang. Gambaran ini berkebalikan dengan yang terjadi Desa Kedungpoh dan Desa Katongan. Dahulu kesulitan memperoleh air untuk rumah tangga dan pertanian yang dijumpai di kedua desa ini sudah menjadi hal biasa. Saat ini, khususnya di Desa Kedungpoh, untuk pemenuhan kebutuhan air bersih pada musim kemarau tidak lagi sesulit 20-30 tahun lalu.

Degradasi lahan di Hulu DAS Jratunseluna (Desa Gondanglegi dan Gunungsari) telah mencapai tingkat memprihatinkan. Tingkat kesuburan lahan dan ketersediaan air di Desa Gondanglegi pada 40-50 tahun lalu lebih baik dibanding sekarang. Lapisan olah tanah (solum) berupa humus di Desa Gondanglegi telah mengalami penipisan yang berat, terutama akibat erosi dan

pengurusan oleh tanaman semusim. Dahulu usahatani padi gogo dan palawija tanpa menggunakan pupuk. Sekarang ini tanpa pupuk anorganik hampir dipastikan hasil dari tanaman padi, kedelai, dan jagung tidak akan mencukupi kebutuhan pangan keluarga.

Gambaran yang berbeda ditunjukkan di Desa Kedungpoh. Di desa ini semangat petani menanam lahan dengan tanaman semusim semakin berkurang. Usahatani tanaman semusim yang berkembang tidak lagi ubikayu untuk gaplek, melainkan telah bergeser ke padi, jagung dan kedelai. Lahan pekarangan mulai banyak dimanfaatkan untuk tanaman keras, yaitu tanaman buah-buahan dan kayu jati. (Larangan menanam kayu jati tidak lagi menjadi "momok" petani, sehingga banyak petani memanfaatkan lahan tegalan dan pekarangan untuk tanaman kayu-kayuan). Meluasnya pemanfaatan lahan untuk tanaman keras dalam 10 tahun terakhir sangat terasa. Tanam keras jenis kayu-kayuan dan buah-buahan berkembang di Desa Kedungpoh dan Katongan. Pengaruh positif perkembangan tanaman keras ini terhadap perbaikan sistem hidrologi di Desa Kedungpoh sangat terasa.

Perbaikan modal alam secara partisipatif sangat menonjol di Desa Kedungpoh. Menurut masyarakat petani di desa ini, kegiatan PT Perhutani dinilai kontra produktif terhadap perbaikan modal alam setempat. Tanaman akasia dan kayu putih yang dikembangkan PT Perhutani dinilai hanya berorientasi untuk mendapat keuntungan ekonomi cepat, tanpa mengindahkan aspek hidrologi, pencemaran zat alelopati dan penurunan kesuburan lahan masyarakat sekitar. Tanaman akasia dinilai masyarakat berpotensi besar mematikan sumber (mata) air setempat, karena daya evapo-transpirasinya relatif tinggi. Tanaman kayu putih memiliki zat alelopati relatif tinggi dan menyebabkan tanaman lain di sekitarnya sulit tumbuh, dan air di sekitarnya mengandung bau "belerang".

Tabel 2. Sebaran Prasarana Ekonomi dan Pemanfaatannya di Keempat Desa Contoh

Aspek prasarana	Ukuran	Desa contoh			
		Gunung-sari	Gondang-legi	Kedung-poh	Katongan
Jalan aspal	ha/100 jiwa	0.17	0.46	1.02	0.23
Roda 4	bh/minggu	0-25	100-200	75-100	50-75
Omset pasar lokal	per minggu	< Rp 5 juta	Rp 10-14 juta	> Rp 14 juta	Rp 5-10 juta
Kendaraan roda 4	Bh	3	4	10	6
Kendaraan roda 2	Bh	30	35	85	43
Mobilitas ke luar	Org/hari	< 50	150-250	> 250	100-150

Desa Kedungpoh dan Gondanglegi memiliki modal prasarana (*constructed capital*) yang lebih baik dibanding dua desa contoh lainnya (Tabel 2). Dilihat dari tingkat kemampuan masyarakat pedesaan dalam mengembang-

kan aktivitas pasar dan melakukan mobilitas sosial secara spasial, gambaran yang ditunjukkan Desa Kedungpoh sedikit lebih baik dibanding Desa Gondanglegi. Mobilitas spasial di Desa Gunungsari jauh lebih rendah dibanding Desa Kedungpoh, Katongan dan Gondanglegi. Keterbukaan masyarakat Desa Kedungpoh terhadap ekonomi pasar relatif sudah besar. Secara keseluruhan bisa dibuat penilaian bahwa dibanding tiga desa contoh lainnya kemajuan ekonomi pada masyarakat Desa Kedungpoh paling tinggi; kemudian disusul Desa Gondanglegi, Katongan dan Gunungsari.

Petani dan Pengelolaan ALK

Masyarakat di empat desa contoh masih mencerminkan budaya atau peradaban masyarakat agraris. Sebagian besar (lebih dari 75%) penduduknya bekerja di pertanian (Tabel 3). Perkembangan ke arah peradaban ekonomi pasar pada masyarakat Desa Kedungpoh relatif lebih menonjol dibanding ketiga desa contoh lainnya. Dilihat dari proporsi pekerja wiraswastanya, Desa Kedungpoh paling tinggi (13,16%) dibanding tiga desa contoh lainnya. Tingkat kemajuan berikutnya adalah Desa Gondanglegi (9,21%) dan Katongan (6,63%). Gambaran masyarakat dengan tingkat kewirausahaan yang paling rendah adalah pada Desa Gunungsari (0,43%). Perlu dikemukakan bahwa proporsi buruh tani di Desa Gondanglegi masih relatif besar (36,05%), dan hal ini menunjukkan gambaran paling buram dibanding tiga desa contoh lainnya. Dapat dikatakan bahwa perkembangan kemajuan peradaban ekonomi pasar yang paling menonjol adalah Desa Kedungpoh, dan paling rendah adalah Desa Gunungsari.

Tabel 3. Sebaran Rumah Tangga Contoh Menurut Mata Pencapaian, 1999-2000

Mata Pencapaian	Desa contoh (satuan "orang" dan dalam kurung "%")							
	Gunungsari		Gondanglegi		Kedungpoh		Katongan	
Petani/buruh tani	875	(93.88)	460	(84.71)	2289	(77.41)	3410	(90.07)
Tukang	43	(4.61)	14	(2.58)	166	(5.61)	79	(2.09)
Wiraswasta	4	(0.43)	50	(9.21)	389	(13.16)	251	(6.63)
PNS/ABRI/Swasta	10	(1.07)	19	(3.50)	113	(3.83)	46	(1.22)
Jumlah	932	(100)	543	(100)	2957	(100)	3786	(100)

Sumber: Monografi empat desa contoh, diolah.

Usaha pertanian di keempat desa contoh masih menjadi andalan pendapatan keluarga petani (Tabel 4). Perkembangan pertanian dan usaha ekonomi di desa contoh dapat dijadikan gambaran tentang pengelolaan ALK setempat. Manfaat pola usahatani konservasi pada peningkatan pendapatan rumah tangga paling besar dirasakan petani di Desa Gunungsari (>75%), sedangkan untuk Desa Gunungsari, Kedungpoh dan Katongan masing-masing <45 persen. Namun demikian, tingkat kemampuan petani dalam mengelola ALK

(untuk memperoleh pendapatan rumah tangga) paling tinggi ditunjukkan oleh petani di Desa Katongan (>Rp 4,3 juta/tahun), kemudian disusul Desa Kedungpoh (Rp 3,9 juta/tahun), Gondanglegi (Rp 2,8 juta/tahun) dan Gunungsari (Rp 2,7 juta/tahun).

Tabel 4. Sebaran Pendapatan Rumah Tangga Responden per Tahun Menurut Sumbernya di Keempat Desa Contoh

Sumber Pendapatan	Gunungsari		Gondanglegi		Kedungpoh		Katongan	
	(Rp.000)	(%)	(Rp.000)	(%)	(Rp.000)	(%)	(Rp.000)	(%)
Usaha pertanian	2.660,873	33,42	2.767,591	30,42	854,257	43,51	4.348,809	51,23
Tanaman semusim	887,750	11,15	827,754	9,10	728,710	8,23	1.500,562	17,68
Tanaman tahunan	758,244	9,52	555,000	6,10	1.625,000	18,34	1.013,500	11,94
Ternak	639,444	8,03	857,045	9,42	1.213,333	13,70	1.000,800	11,79
Ikan	0	0	0	0	0	0	625,000	7,36
Lainnya	375,435	4,72	527,792	5,81	287,214	3,24	208,947	2,46
Usaha industri	1.980,000	24,87	526,000	5,78	1.276,000	14,40	1.964,462	23,14
Usaha jasa	1.742,667	21,89	3.613,158	39,71	2.304,632	26,01	2.110,077	24,86
Buruh	1.578,059	19,82	2.191,667	24,09	1.424,286	16,09	66,333	0,78
Buruh tani	374,000	4,70	299,167	3,29	90,000	1,02	0	0
Buruh industri dan jasa	1.204,059	1,51	1.892,500	20,80	1.334,286	15,06	6,333	0,78
Total	7.961,599	100,00	9.098,416	100,00	8.859,175	100,00	8.489,681	100,00

Tabel 5 menjelaskan tentang persepsi petani terhadap perbaikan pengelolaan ALK di keempat desa contoh. Tampak bahwa persepsi petani tentang P2LK (Desa Gunungsari dan Gondanglegi) dan PBD (Desa Kedungpoh) memberikan gambaran yang positif. Petani di Desa Katongan, yang tidak terkena PBD, memiliki persepsi yang relatif kurang positif dibanding petani di tiga desa contoh yang terkena program usahatani konservasi. Persepsi yang paling positif terhadap program perbaikan pengelolaan ALK ditunjukkan oleh petani di Desa Kedungpoh. Hal ini bisa dimengerti karena Desa Kedungpoh telah paling lama dijadikan daerah program pengembangan ALK, sejak 1980 (hingga 1995).

Masalah kesulitan air di musim kemarau, khususnya di Desa Gondanglegi dan Desa Gunungsari, hingga kini masih belum bisa terpecahkan. Persepsi petani di Desa Gunungsari terhadap peningkatan ketersediaan air sangat rendah (5,88%), namun cukup bagus di Desa Kedungpoh (29,41%). Faktor lamanya program dijalankan dan lengkapnya elemen program (PBD), khususnya dilihat dari pemberdayaan masyarakat, diperkirakan berpengaruh besar terhadap peningkatan ketersediaan air. Relatif tingginya persepsi petani Desa Katongan terhadap ketersediaan air diperkirakan karena pengaruh

“induksi” dari keberhasilan PDB di Desa Kedungpoh, tersedianya sumber air dan adanya kelompok tani pompa air di Dukuh Jeruklegi.

Tabel 5. Persepsi Petani (Responden) tentang Program Perbaikan Sumberdaya Alam di Keempat Desa Contoh

Keterangan	Desa contoh							
	Gunungsari		Gondanglegi		Kedung Poh		Katongan	
	n=34	(%)	n=40	(%)	n=34	(%)	n=40	(%)
1. Perbaikan mutu lahan	26	76,47	27	67,50	32	94,12	14	35,00
2. Perbaikan penda- patan petani	23	67,65	26	65,00	34	100,00	10	25,00
3. Penghematan tenaga kerja	16	47,06	18	45,00	21	61,76	3	7,50
4. Penghematan input tunai	17	50,00	19	47,50	16	47,06	8	20,00
5. Perubahan bentuk lahan	23	67,65	23	57,50	29	85,29	15	37,50
6. Sertifikasi lahan	15	44,12	16	40,00	20	58,82	13	32,50
7. Peningkatan ketersediaan air	2	5,88	5	12,50	10	29,41	7	17,50
8. Harapan perbaikan taraf hidup	28	82,35	35	87,50	32	94,12	27	67,50

Pada P2LK maupun PBD dilakukan perbaikan mutu lahan melalui perubahan bentuk lahan atau *land-que capital*, berupa pembuatan terasering, guludan dan penanaman tanaman penguat teras. Pada lahan miring atau *steep land* pengaruh pengembangan *land-que capital* sangat besar untuk menekan erosi dan memperbaiki atau mempertahankan kesuburan lahan. Program terasering mendapat penilaian positif, terutama oleh petani di Desa Kedungpoh dan desa-desa sekitarnya. Pada desa (Desa Gunungsari) yang relatif lebih berbukit-bukit dan tandus, program terasering memberi pengaruh yang lebih besar (dalam memperbaiki kondisi ALK setempat) dibanding pada desa yang ketandusannya relatif kecil (Desa Gondanglegi).

Tata-nilai dan Modal Sosial

Masyarakat pedesaan di keempat desa contoh merupakan hasil dari dinamika tatanan sejarah budaya dan ekologi agraris masyarakat Jawa. Pedesaan di dua lokasi penelitian, menurut Lombart (2000), de Graaf dan Piageud (2001), dan Purwadi (2004), sudah terbentuk sebelum abad 17. Walaupun tidak semua tingkat kehidupan masyarakat di keempat desa contoh mengalami kemajuan, atau setidaknya tidaknya ada yang kemajuannya mengalami masa pasang surut, namun secara sosio-historis masyarakat di keempat desa contoh memiliki kekuatan untuk tetap bertahan hidup dan sekaligus menghindarkan diri dari proses pemunahan secara alami. Ini menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat pedesaan tidak sekedar adanya sekumpulan

manusia yang secara fisik telah hidup bersama dalam kurun tertentu, melainkan ada "semangat" atau ruh sosial yang menjadi kekuatan pengikat kehidupan kolektif mereka. Kekuatan budaya nonmaterial atau modal sosial menjadi faktor penting mengapa masyarakat di keempat desa contoh hingga sekarang masih bisa bertahan.

Terpenuhinya kebutuhan pangan merupakan hal yang esensial bagi kehidupan masyarakat pedesaan. Namun demikian di keempat desa contoh hampir tidak ditemukan terjadi konflik dengan kekerasan yang diakibatkan oleh kurang tercukupi kebutuhan bahan pangan. Juga nyaris tidak terlihat gejala "penghancuran solidaritas sosial" akibat masyarakat mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya. Nilai budaya dan modal sosial setempat bukan saja bisa menjadi inti kekuatan yang mampu mengakomodasi masalah kekurangan pangan dan faktor kesulitan hidup lainnya, melainkan juga bisa diarahkan untuk mengatasi kekurangan pangan secara kolektif. Adanya Lumbung Paceklik di Desa Kedungpoh, yang kemudian menjadi Lumbung Padukuhan (Pranadi, 1986) dan kemudian berkembang menjadi Lumbung Desa (di tingkat desa), menunjukkan bahwa masyarakat tingkat dukuh memiliki kekuatan modal sosial untuk mengatasi masalah kesulitan hidup secara kolektif. Sayangnya, setelah adanya KUD (Koperasi Unit Desa), lembaga semacam Lumbung Desa menjadi tidak berfungsi dan kemudian mati.

Masyarakat pedesaan tidak hanya mencerminkan rajutan vertikal, melainkan juga rajutan horisontal. Kekuatan kolektivitas masyarakat Desa Kedungpoh dan Desa Gondanglegi, misalnya, lebih banyak ditopang oleh kolektivitas horisontal masyarakat dukuh daripada kolektivitas vertikalnya (dukuh-desa). Masyarakat dukuh memiliki rajutan horisontal yang relatif kuat dibanding desa. Walaupun secara hirarkhi pemerintahan penyelenggaraan administrasi pedukuhan masih dikendalikan pemerintahan desa, namun perkembangan tata-nilai (misalnya nilai kewirausahaan) masyarakat pedukuhan telah dapat melintasi batas geografi, budaya dan pemerintahan desa. Hubungan kekerabatan dan ketetanggaan bisa menjadi wadah pengembangan kewirausahaan kolektif tingkat dukuh dan subdukuh. Kelembagaan ekonomi tingkat desa, seperti KUD, tidak mampu menunjukkan sebagai wadah pengembangan kewirausahaan kolektif tingkat desa.

Dapat dikemukakan bahwa aspek kepercayaan atau *trust* menjadi komponen utama pembentuk modal sosial di pedesaan. Aspek lain, seperti kerja sama (*cooperation*) dan jaringan kerja (*net-work*), menurut hemat penulis tidak akan terbentuk dengan mantap jika tidak dilandaskan pada terbentuknya hubungan saling percaya (*mutual-trust*) antaranggota masyarakat. Masih banyak peneliti dan pakar modal sosial tidak menunjukkan secara tegas adanya hubungan kuat antara kepercayaan dengan pembentukan kerja sama, dan jaringan kerja masyarakat. Pelu ditegaskan bahwa kekuatan kerja sama dan jaringan kerja yang terbentuk di masyarakat adalah pengembangan operasional

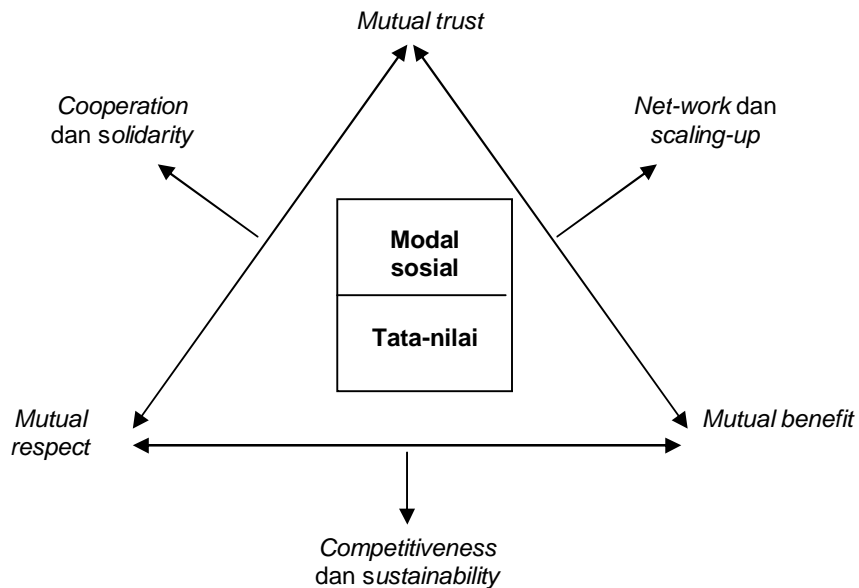
dari hubungan saling percaya antaranggota masyarakat di bidang sosio-budaya, ekonomi dan pemerintahan ("politik").

Dalam kehidupan sosial di pedesaan, pengertian kepercayaan (*trust*) seharusnya tidak dilihat sekedar sebagai masalah personalitas (psikologis) atau intrapersonal, melainkan mencakup juga aspek ekstrapersonal dan inter-subyektif. Kasus pada masyarakat dukuh di Desa Kedungpoh, Katongan, dan Gondanglegi menunjukkan bahwa makna terbentuknya rasa saling percaya (*mutual trust*) adalah hasil interaksi yang melibatkan (paling tidak antar tiga) anggota masyarakat dalam suatu kelompok ketetanggaan, asosiasi tingkat dukuh, organisasi tingkat desa, dan berkembangnya sistem jaringan sosial hingga melintasi batas desa. Pada suatu masyarakat ketetanggaan atau dukuh yang mengandung kontradiksi sosial relatif tinggi, maka jaringan kepercayaan yang terbentuk umumnya relatif sempit hingga pada tingkat hubungan yang bersifat personal dan persaudaraan yang lebih banyak diwarnai nilai-nilai primordial atau askriptif. Sebaliknya, pada masyarakat yang berpotensi cepat maju umumnya mampu mengembangkan jaringan kepercayaan (*mutual trust*) yang relatif besar.

Sampai seberapa besar jaringan kepercayaan yang dikembangkan suatu masyarakat pedesaan, hal itu sangat tergantung pada kandungan elemen tata-nilai yang secara keseharian hidup di masyarakat. Dapat dikemukakan ada 12 elemen dasar tata-nilai yang menentukan tingkat kemajuan atau kekuatan modal sosial masyarakat pedesaan. Bisa cepat maju atau tidaknya suatu masyarakat hal itu ditentukan oleh seberapa jauh mutu kedua-belas elemen dasar tata-nilai tersebut dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tata-nilai yang tampak dalam masyarakat umumnya tidak langsung bisa dilihat dari masing-masing dua belas elemen dasarnya, melainkan akan lebih mudah dilihat dari (misalnya) empat elemen nilai kompositnya, yaitu:

- (1) Ditegakkannya sistem sosial di pedesaan yang berdaya saing tinggi ("produktif") namun berwajah humanistik (tidak eksploitatif dan intimidatif terhadap sesama manusia atau masyarakat).
- (2) Diintegalkannya sistem keadilan yang dilandaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia (tidak imperialistik dan menegasi kehidupan sosial).
- (3) Ditegakkannya sistem solidaritas yang dilandaskan pada hubungan saling percaya (*mutual-trust*) antarelemen pembentuk sistem masyarakat. Elemen terkecil adalah individu, sedangkan elemen yang lebih besar bisa berupa kelompok, asosiasi atau organisasi sosial. (Desa bisa dipandang sebagai organisasi sosial yang sudah bersifat kompleks).
- (4) Dikembangkannya peluang untuk mewujudkan tingkat kemandirian dan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang relatif tinggi, yang hal ini merupakan salah satu bagian terpenting keberadaan suatu masyarakat, dapat dipandang sebagai resultan dari ketiga butir di atas.

Banyak ditemukan di berbagai makalah ilmiah, terutama yang menggunakan kasus masyarakat atas desa, bahwa modal sosial umumnya mengetengahkan bahasan terhadap tiga dimensi (*trust*, *cooperation* dan *net-work*), tanpa memperhatikan tata-nilai di belakangnya (Gambar 4). Jika pengembangan modal sosial hanya dilandaskan pada tiga dimensi tersebut diperkirakan akan menghasilkan penjelasan yang rancu atau kontradiktif. Dimensi kerja sama atau *cooperation*, misalnya, tidak akan terwujud jika dalam masyarakat (kecil ataupun besar) tidak dapat dibangun kaidah kolektivitas yang dilandaskan pada hubungan *mutual respect*, dan pengembangan jaringan kerja atau *net-work* secara progresif. Jaringan kerja tidak akan berkembang jika di dalamnya tidak dibangun kolektivitas tanpa dilandaskan pada kaidah hubungan *mutual benefit*. Seyogyanya pengembangan hubungan *mutual trust*, *mutual respect* dan *mutual benefit* dalam sistem sosial adalah rangkaian lingkaran luar dari modal sosial. Lingkaran dalam atau inti modal sosial adalah tata-nilai yang hidup di masyarakat tersebut.



Gambar 3. Tata-nilai sebagai Inti, Pembentuk dan Penguat Modal Sosial

Modal Sosial dan Pengelolaan ALK

Modal sosial di setiap desa contoh memiliki kekuatan yang berbeda (Tabel 6). Dibanding tiga desa contoh lain, yang memiliki modal sosial paling kuat adalah Desa Kedungpoh. Modal sosial yang dimiliki Desa Kedungpoh

tergolong kuat (4,01). Dua desa yang memiliki modal sosial yang tergolong antara sedang dan kuat adalah Desa Gondanglegi (3,47) dan Desa Katongan (3,35). Hanya satu desa yang memiliki modal sosial tergolong lemah atau paling lemah (2,53), yaitu Desa Gunungsari. Terlihat bahwa salah satu dukuh (Dukuh 2) di Desa Gunungsari memiliki modal sosial tergolong lemah (1,98), sementara dukuh yang lain (Dukuh 1) modal sosialnya tergolong sedang (3,04).

Menarik untuk dikemukakan bahwa kekuatan modal sosial antardukuh dalam satu desa tidaklah sama. Sebagai gambaran, pada Desa Gunungsari, kekuatan modal sosial pada Dukuh 1 tergolong sedang (3,04) dan pada Dukuh 2 (2,00) tergolong lemah. Demikian juga pada Desa Katongan, modal sosial pada Dukuh 1 mendekati sedang (2,80) dan pada Dukuh 2 mendekati kuat (3,89). Modal sosial antardukuh yang relatif seimbang ditunjukkan di Desa Kedungpoh dan Gondanglegi. Dari Tabel 8 juga dapat ditunjukkan bahwa ketimpangan kekuatan modal sosial antardukuh yang paling besar terlihat di Desa Gunungsari. Sepertinya ada hubungan erat antara relatif tingginya ketimpangan kekuatan modal sosial tingkat dukuh dengan lemahnya modal sosial di tingkat desa.

Tabel 6. Kekuatan Modal Sosial Menurut Elemen Pembentuknya pada Keempat Desa Contoh

Elemen Modal Sosial	Gunungsari		Gondanglegi		Kedungpoh		Katongan	
	Dukuh1	Dukuh2	Dukuh1	Dukuh2	Dukuh 1	Dukuh2	Dukuh1	Dukuh2
Pemerintahan	2,50	1,50	3,00	3,00	3,50	3,50	2,50	3,50
Kepemimpinan	3,63	2,25	3,88	3,50	4,25	4,25	3,38	3,88
Elit - anak buah	3,50	2,00	4,00	3,50	4,50	4,00	2,00	4,00
Solidaritas	3,50	2,00	4,00	3,00	4,00	4,00	3,00	4,00
Gotongroyong	2,50	2,00	3,50	3,00	4,00	4,00	3,00	4,00
Manajemen sosial	3,29	2,14	3,86	3,29	4,14	4,00	2,71	3,86
Jaringan kerja	2,00	2,00	4,00	3,00	4,00	4,00	3,00	4,00
Rata-rata dukuh	3,04	1,98	3,75	3,18	4,06	3,96	2,80	3,89
Rata-rata desa	2,52		3,47		4,01		3,35	

Keterangan: 1=sangat lemah; 2=lemah; 3=sedang; 4=kuat; 5=sangat kuat

Secara kuantitatif bisa saja dikatakan bahwa kekuatan modal sosial tingkat desa merupakan penjumlahan modal sosial tingkat dukuh. Namun demikian tetap harus dipahami bahwa cara pandang demikian tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan di lapangan. Dapat ditunjukkan bahwa hubungan antara dukuh satu dengan dukuh lain tidak selalu mencerminkan keharmonisan. Dapat dikatakan bahwa modal sosial di tingkat desa tidak sepenuhnya mencerminkan penjumlahan modal sosial setiap dukuh dalam satu desa. Jika di satu desa dijumpai terdapat kesenjangan kekuatan modal sosial antardukuh relatif besar, maka penggunaan pendekatan kuantitatif perlu dilakukan secara lebih hati-hati.

Kesenjangan modal sosial antardukuh yang berdekatan menunjukkan kemungkinan adanya ketidakharmonisan hubungan antardukuh dalam satu

desa. Hal ini sekaligus memberikan petunjuk bahwa kemungkinan besar kekuatan pemerintahan dan kepemimpinan Kepala Desa tidak mampu menembus masyarakat lapisan bawah di tingkat dukuh. Akan sulit mengharapkan kekuatan kepemimpinan Kepala Desa mampu menyeimbangkan dan menggabungkan kekuatan modal sosial yang tersebar pada berbagai satuan komunitas kecil (dukuh) dalam bangunan modal sosial tingkat desa. Salah satu dukuh di Desa Katongan, yaitu Dukuh Jeruklegi, memiliki kemampuan untuk membangun modal sosial relatif mandiri. Tingkat ketergantungannya pada pusat pemerintahan desa dalam penguatan modal sosial relatif kecil. Gambaran yang sama juga terlihat di Desa Gunungsari, di saat pemerintahan desa dinilai tidak berfungsi normal, kehidupan masyarakat dukuh relatif tidak terpengaruh.

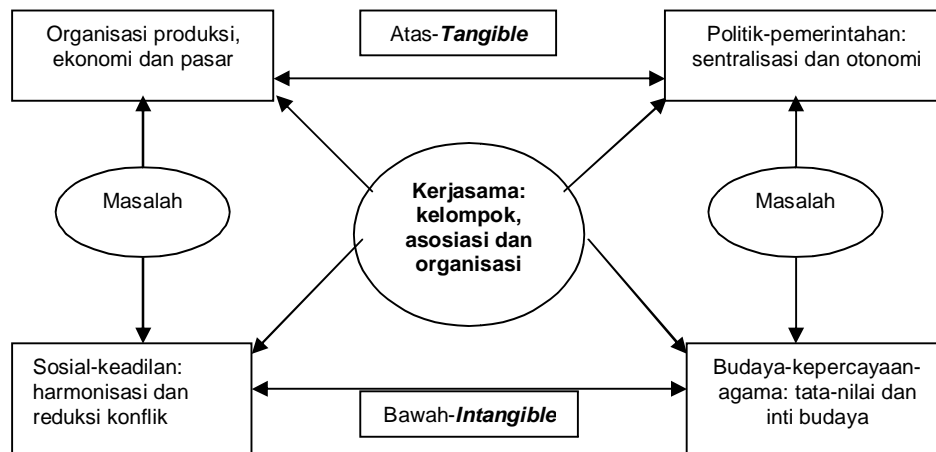
Pada Desa Gunungsari terlihat terjadi ketimpangan modal sosial antar-dukuh (Dukuh 1 dan Dukuh 2). Paling tidak ada tiga penyebab terjadinya ketimpangan kekuatan modal sosial antar dua dukuh contoh, yaitu: perbedaan manajemen sosial, kepemimpinan, dan hubungan elit-anak buah. Pada Dukuh 1 elemen kepemimpinan (nonformal), yang terkait dengan kemampuan pemimpin dalam melakukan komunikasi dengan anak buahnya, kemampuan khusus yang dimiliki pemimpin, menggalang kebersamaan (*solidarity maker*), dan menegakkan prinsip demokrasi (musyawarah) dalam pengambilan keputusan bersama (Tabel 7), lebih kuat dibanding yang terdapat pada Dukuh 2. Hal yang hampir sama juga bisa diamati di Desa Katongan. Modal sosial tingkat desa akan kuat jika bisa dibangun "jembatan" (*bridging*; Malvicini and Sweetser, 2003) yang menghubungkan antara dukuh 1, dukuh 2 dan seterusnya. Selain itu, modal sosial tingkat desa akan kuat jika antareleman (tipe) kerja sama tidak terputus atau terjadi *missing link*.

Tabel 7. Kekuatan Kepemimpinan Masyarakat di Tingkat Dukuh dan Desa menurut Komponen Pembentuknya

Elemen Kepemimpinan	Gunungsari		Gondanglegi		Kedungpoh		Katongan	
	Dukuh1	Dukuh2	Dukuh1	Dukuh2	Dukuh1	Dukuh2	Dukuh1	Dukuh2
Visi ke depan	3	1	3	3	3	3	2	3
Motivasi	3	2	3	3	4	4	3	3
Altruistik	3	2	3	3	3	3	2	3
Inspiring	3	2	4	3	4	4	3	3
Kemam. khusus	4	3	4	3	4	4	4	4
Komunikasi	4	2	5	4	5	5	4	4
<i>Solidarity maker</i>	3	2	3	3	4	4	3	4
Rasional	3	3	3	3	3	3	3	3
Demokratik	3	2	3	3	4	4	3	4
Rata-rata dukuh	3,63	2,38	3,88	3,50	4,25	4,25	3,38	3,88
Rata-rata desa	3,00		3,69		4,25		3,63	

Keterangan: 1=sangat lemah; 2=lemah; 3=sedang; 4=kuat; 5=sangat kuat

Terbentuknya modal sosial tidak bisa dipandang sebagai hasil penjumlahan sekumpulan (kekuatan) individu pembentuk sistem masyarakat, melainkan harus dipandang sebagai terbentuknya jaringan kerja sama yang dinamik dan terorganisir (Gambar 4). Terbentuknya jaringan kerja sama ini mengandung dua makna, yaitu: penggabungan dan persenyawaan. Makna penggabungan diibaratkan pencampuran elemen gula, air panas dan teh untuk menghasilkan secangkir minuman teh hangat. Sedangkan makna persenyawaan diibaratkan mensenyawakan elemen hidrogen (atom H) dan oksigen (atom O) untuk menghasilkan air (H_2O). Jika kesadaran kolektif masyarakat (Pretty, 2003) bisa diarahkan untuk kerja sama dalam kegiatan umum (*public action*), misalnya dalam memelihara atau memperbaiki ALK (*re-newable natural capital*), maka saat itulah baru bisa dikatakan bahwa modal sosial setempat bisa dijadikan kekuatan untuk mendukung upaya perbaikan pengelolaan ALK di pedesaan. Keberhasilan pengelolaan ALK merupakan bagian dari hasil kerja secara saling bahu-membahu (*simetrical interdependency*) atau gotong-royong masyarakat komunal setempat.



Gambar 4. Hubungan Interaktif antara Kerja Sama (Kelompok, Asosiasi dan Organisasi Sosial) dan Terbentuknya Jaringan Organisasi Kompleks (Produksi/Ekonomi, Politik-Pemerintahan, Sosial-Keadilan dan Budaya-Kepercayaan)

Kemiskinan dan Pengelolaan ALK

Keterbelakangan masyarakat pedesaan terkait erat dengan lemahnya modal sosial. Dalam jangka panjang keterbelakangan ini berpeluang besar memunculkan kerusakan ALK di pedesaan ke tingkat yang semakin parah. Kemiskinan merupakan bentuk paling akhir terjadinya kerusakan ALK dan lemahnya modal sosial di pedesaan. Tabel 8 menggambarkan sebaran

kemiskinan di desa contoh menurut beberapa indikator kebutuhan dasar manusia. Dengan ukuran pendapatan ekivalen 2100 kalori per kapita per hari tampak bahwa kemiskinan yang paling parah terjadi di Desa Gunungsari. Desa Kedungpoh adalah yang menunjukkan gambaran paling rendah tingkat kemiskinannya.

Tingkat kemiskinan masyarakat jika diukur berdasar atas kemampuan menyekolahkan anak hingga tingkat SMP menunjukkan bahwa masyarakat petani di Desa Kedungpoh paling tinggi dibanding tiga contoh desa lainnya. (Penguatan sumberdaya manusia atau modal manusia pedesaan merupakan elemen modal sosial yang penting di pedesaan). Gambaran ini sangat sejalan dengan kekuatan modal sosial yang dimiliki masyarakat petani di Desa Kedungpoh. Terdapat hubungan erat antara kuatnya modal sosial yang dimiliki suatu masyarakat dengan kemampuan mengatasi kemiskinan dan kemampuan dalam mengelola ALK. Dengan kuatnya modal sosial paling tidak harapan dipenuhinya tujuan pembangunan pedesaan berkelanjutan, yaitu berupa pemenuhan kebutuhan dasar atau keadilan sosial, relatif mudah diatasi.

Tabel 8. Sebaran Rumah Tangga menurut Indikator Kemiskinan di Keempat Desa Contoh

Indikator kemiskinan	Gunungsari		Gondanglegi		Kedungpoh		Katongan	
	n=34	%	n=41	%	n=41	%	n=34	%
2100kal/kpt/hr(A)								
- Di bawah	16	47,06	17	41,46	5	12,20	8	23,53
- Pada garis	4	11,76	6	14,63	3	7,32	5	14,71
- Di atas	14	41,18	18	43,90	33	80,49	21	61,76
Jumlah	34	100,00	41	100,00	41	100,00	34	100,00
(A)+Anak SD (B)								
- Di bawah	18	52,94	28	68,29	19	46,34	14	41,18
- Pada garis	4	11,76	5	12,20	4	9,76	6	17,65
- Di atas	12	35,29	8	19,51	18	43,90	14	41,18
Jumlah	34	100,00	41	100,00	41	100,00	34	100,00
(B)+SMP								
- Di bawah	33	97,06	35	85,37	26	63,41	25	73,53
- Pada garis	1	2,94	2	4,88	3	7,32	3	8,82
- Di atas	0	0,00	4	9,76	12	29,27	6	17,65
Jumlah	34	100,00	41	100,00	41	100,00	34	100,00

Berdasar persepsi petani dapat ditunjukkan bahwa gambaran perbaikan mutu dan bentuk lahan paling tinggi terjadi di Desa Kedungpoh (Tabel 5). Artinya, program perbaikan sumberdaya alam atau ALK yang diperkenalkan melalui PBD telah dapat diterima dan diikuti oleh petani Desa Kedungpoh secara baik. Dilihat dari dampaknya terhadap ketersediaan air, PBD di Desa Kedungpoh juga menunjukkan gambaran paling baik dibanding tiga desa contoh

lainnya. Ditinjau dari harapan petani dapat meningkatkan taraf kehidupannya berdasar kondisi sumberdaya alam setempat, petani Desa Kedungpoh (94,12%) menunjukkan gambaran paling tinggi (baik) dibanding Desa Gondanglegi (87,50%), dan Desa Gunungsari (82,35%). Bisa dimengerti jika Desa Katongan (67,50%) menunjukkan gambaran paling rendah, karena desa ini sejak awal tidak tersentuh langsung kegiatan proyek (PBD).

Dalam kegiatan pengembangan usahatani konservasi, Desa Kedungpoh menunjukkan gambaran yang tergolong baik. Dilihat dari proporsi pendapatan rumah tangga dari usahatani tanaman tahunan Desa Kedungpoh menunjukkan yang paling tinggi (Tabel 4). Jika tingginya proporsi pendapatan rumah tangga dari usahatani tanaman tahunan bisa dijadikan indikator tingginya kualitas pengelolaan ALK, maka Desa Kedungpoh memiliki peringkat paling tinggi dalam pengelolaan ALK di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kualitas pengelolaan ALK sangat ditentukan oleh kuatnya modal sosial setempat. Selain itu, kualitas pengelolaan ALK di suatu desa terkait erat dengan perkembangan kegiatan perekonomian nonpertanian, pengurangan kemiskinan, dan pengembangan modal manusia atau SDM.

Perkembangan pengelolaan ALK di pedesaan adalah bagian dari transformasi sosio-budaya masyarakat pedesaan setempat. Jika upaya perbaikan pengelolaan ALK hanya mengandalkan introduksi teknologi fisik atau TUK, peluang untuk berhasil relatif kecil. Namun jika upaya tersebut diintegrasikan dengan pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui penguatan modal sosialnya secara komprehensif, maka peluang keberhasilannya akan relatif besar. Dampak dari penguatan modal sosial ini baru akan teramati setelah proses adopsi dan adaptasi terhadap teknik konservasi ini menjadi bagian dari transformasi sosio-budaya, atau setidaknya-tidaknya proses akulturasi, pada masyarakat pedesaan setempat.

Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pengelolaan ALK dapat dilihat dari sejauh mana kesejahteraan masyarakat pedesaan dapat dicapai. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Gunungsari paling rendah dibanding tiga desa contoh lainnya (Tabel 8). Lebih separuh penduduk Desa Gunungsari dan Gondanglegi tidak mampu mencukupi kebutuhan 2100 kalori/kapita/hari. Jika kemampuan menyekolahkan anak hingga SMP ditambahkan sebagai ukuran, maka >60 persen penduduk di keempat desa contoh berada di bawah garis kemiskinan. Urutan (dari paling buruk) tingkat kesejahteraannya adalah Desa Gunungsari, Gondanglegi, Katongan dan Kedungpoh.

Dilihat dari proporsi alokasi penggunaannya, sebagian besar pendapatan rumah tangga petani adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau pangan (Tabel 9). Besarnya nilai pendapatan absolut yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat rumah tangga petani berbanding lurus

dengan proporsinya (Tabel 12). Ini menunjukkan bahwa pemenuhan kecukupan karbohidrat pada masyarakat pedesaan contoh masih menjadi masalah serius. Tingkat keborosan penduduk di keempat desa contoh, terutama dilihat dari alokasi pengeluaran untuk karbohidrat impor dan membeli makanan jadi, belum menunjukkan gejala mengkhawatirkan. Relatif kecilnya pendapatan rumah tangga diperkirakan menjadi penyebab utama mengapa gejala keborosan masyarakat pedesaan belum terlihat secara jelas.

Tabel 9. Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga pada Keempat Desa Contoh Menurut Kebutuhan Pangan dan Nonpangan

Sumber Pendapatan	Jawa Tengah				DI Yogyakarta			
	Gunungsari		Gondanglegi		Kedungpoh		Katongan	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Kebutuhan dasar	4.322.922	73,11	4.754.237	69,77	4.077.187	64,59	4.589.378	69,29
Investasi SDM	442.135	7,48	425.778	6,25	545.306	8,64	631.959	9,54
Investasi sosial	756.056	12,79	1.196.588	17,56	1.289.299	20,43	952.371	14,38
Penampilan & kesehatan rohani	343.171	5,80	378.429	5,55	359.196	5,69	409.977	6,19
Pajak	48.853	0,83	59.385	0,87	41.166	0,65	40.059	0,60
Jumlah	5.913.137	100,00	6.814.418	100,00	6.312.154	100,00	6.623.743	100,00

Proporsi alokasi pendapatan untuk investasi (modal) sosial paling besar terlihat pada Desa Kedungpoh (20,43%), disusul Desa Gondanglegi (17,56%), Katongan (14,38%), dan Gunungsari (12,79%). Semakin kecil proporsi alokasi (pendapatan keluarga) untuk kebutuhan dasar menunjukkan kecenderungan semakin besar proporsi alokasi untuk penguatan modal sosial. (Memelihara atau menguatkan modal sosial dibutuhkan biaya, dan biaya tersebut berasal dari masyarakat bersangkutan). Baum (1999) menggambarkan bahwa semakin tercukupi kebutuhan pangan, semakin besar potensi masyarakat pedesaan untuk menguatkan modal sosialnya. Mendistribusikan kesejahteraan untuk pemenuhan kebutuhan dasar di pedesaan dapat diartikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan menguatkan modal sosialnya.

Tabel 6 menunjukkan urutan kekuatan modal sosial yang dimiliki masing-masing desa contoh, diambil dari rata-rata pedukuhan (setiap 1 desa contoh diambil 2 dukuh). Desa yang memiliki modal sosial paling kuat adalah Desa Kedungpoh, kemudian disusul Desa Gondanglegi, Katongan dan Gunungsari. Kekuatan modal sosial di tingkat dukuh terlihat sangat menentukan kekuatan modal sosial tingkat desa. Hanya sayangnya, kekuatan modal sosial di tingkat dukuh pada setiap desa tidak seragam. Hal ini sekaligus menunjukkan

bahwa masing-masing masyarakat tingkat dukuh memiliki kekhasan komposisi tata-nilai dasar, yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, untuk membangun modal sosialnya.

Elemen modal sosial di pedesaan yang dinilai penting adalah solidaritas, manajemen sosial, jaringan kerja sama dan kegotong-royongan setempat. Peran kepemimpinan sangat penting dalam penguatan modal sosial setempat. Kepemimpinan formal di pedesaan mendapat tempat tersendiri di masyarakat pedesaan. Namun demikian, peran kepemimpinan nonformal umumnya memiliki pengaruh lebih nyata dalam membangun dan memelihara modal sosial. Memperkuat basis kepemimpinan pada tokoh nonformal setempat untuk menguatkan modal sosial setempat dinilai memberikan jaminan lebih baik dibanding jika mengandalkan pada tokoh formal atau tokoh dari desa. Komponen tata-nilai dasar seperti rajin dan kerja keras, empati, kejujuran atau amanah, sabar, rasa malu atau harga diri, dan hidup hemat adalah kumpulan tata-nilai dasar yang berperan penting membentuk modal sosial di pedesaan.

Tabel 10. Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Menurut Desa Penelitian untuk Konsumsi Pangan

Sumber pendapatan	Jawa Tengah				DI Yogyakarta			
	Gunungsari		Gondanglegi		Kedungpoh		Katongan	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Karbohidrat:	1.207.636	33,20	1.517.885	38,54	1.039.860	31,18	1.119.958	30,11
a. Lokal	878.221	24,14	1.096.928	27,85	681.335	20,43	796.069	21,41
b. Impor	329.415	9,06	420.957	10,69	358.545	10,75	323.889	8,71
Buah & sayuran	546.933	15,03	531.079	13,48	520.307	15,60	554.783	14,92
Protein	1.066.216	29,31	1.082.254	27,48	1.034.167	31,01	1.084.180	29,15
Minyak goreng	211.674	5,82	216.303	5,49	174.654	5,24	219.923	5,91
Minuman	296.279	8,14	289.734	7,36	238.775	7,16	336.666	9,05
Roko/tembakau	223.961	6,16	186.732	4,74	162.895	4,88	282.242	7,59
Makanan jadi	85.109	2,34	114.460	2,91	164.467	4,93	121.210	3,26
Jumlah pangan	3.637.810	100,00	3.938.447	100,00	3.335.145	100,00	3.718.966	100,00

Kerangka Penguatan Modal Sosial

Paling tidak ada tiga aspek yang menunjukkan penguatan modal sosial, yaitu: terbentuknya kerja sama dan solidaritas ("kohesivitas"), perluasan jaringan kerja (bermakna peningkatan skala kerja atau jaringan ekonomi), dan peningkatan daya saing kolektif secara berkelanjutan. Di lapangan teramat bahwa ketiga kekuatan modal sosial tersebut dibangkitkan oleh sejumlah tata-nilai (komposit) yang membentuk jaringan *mutual trust*, *mutual respect* dan

mutual benefit. Nilai-nilai rasa malu atau harga diri, empati, kejujuran, amanah, dan altruisme merupakan komponen modal sosial yang strategis. Nilai-nilai pembentuk modal sosial lainnya, seperti: kerja keras, kerajinan, hemat, gandrung inovasi, menghargai prestasi, ber-visi ke depan, rasional sangat penting untuk menciptakan kemajuan atau pertumbuhan (ekonomi) pada budaya material; namun tidak mencukupi untuk menciptakan kerangka pengelolaan ALK di pedesaan secara berkelanjutan.

Tabel 11. Model Hubungan antara Tingkat Masyarakat, Dimensi Waktu dan Elemen Modal Sosial yang Mungkin Dirubah dan Dikuatkan melalui Percepatan Transformasi Sosial di Pedesaan

Dimensi waktu	Elemen yang diubah menurut tingkat masyarakat (<i>Level of Society</i>) dalam proses penguatan modal sosial di pedesaan		
	Mikro (Individu-kel. kecil)	Intermediet (Kel. kecil-dukuh)	Makro (Masyarakat desa)
	Tipe 1	Tipe 3	Tipe 5
Jangka pendek	Kompetensi SDM (1) Sikap dan tindakan (2) Tata-nilai	(1) Tata-nilai (normatif) (2) Administratif dan manajemen sosial	(1) Inovasi-inovasi (2) Revolusi dan kepemimpinan
Jangka panjang	Tipe 2 Siklus kebiasaan dan gaya hidup individual/keluarga/klp kecil	Tipe 4 Tata-nilai (kolektif), kepemimpinan, solidaritas, struktur dan organisasi sosial	Tipe 6 Evolusi modal sosial/ dan sosio-budaya secara menyeluruh

Keterangan: Model dikembangkan dari pemikiran Zaltman and Duncan (1977).

Pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan ALK di pedesaan secara berkelanjutan tidak cukup dilandaskan pada pemberian bantuan material berdasar semangat belas kasihan (“*caritas*”) atau pengembangan sistem usaha atau produksi berbasis lahan, melainkan harus juga mempertimbangkan penguatan semangat kerja kolektif dan menghormati sumberdaya (agroekosistem sebagai) milik bersama. Kombinasi penguatan sejumlah tata-nilai sekaligus; gabungan antara nilai rasa malu, empati dengan nilai kerja keras dan kerajinan; sangat penting untuk dikedepankan. Gabungan nilai penguat modal sosial yang disebut pertama merupakan komponen penting untuk pembuatan model pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam pengelolaan ALK secara berkelanjutan.

Kelemahan utama pemberdayaan masyarakat pedesaan selama ini karena terlalu menekankan pada penguatan modal prasarana, penggunaan jaringan organisasi keproyekan dan pemerintahan yang bersifat sentralistik, *top-down*, dan monolitik. Tabel 11 menggambarkan kerangka atau model penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ALK di pedesaan secara berkelanjutan. Model pemberdayaan yang dianggap sesuai adalah yang mengacu pada **Tipe 6**. Hanya saja untuk mencapai **Tipe 6** perlu ditempuh langkah-langkah **Tipe 3** dan **Tipe 4**, yang dicirikan oleh pentingnya memperkuat modal sosial melalui kekuatan kelompok kecil pada masyarakat

tingkat dukuh. Langkah yang ditempuh melalui **Tipe 1** dan **Tipe 2** dinilai akan banyak menyita tenaga dan biaya, yang hasilnya diperkirakan tidak bisa memperkuat modal sosial di tingkat desa secara langsung. Dalam kaitan ini peran pemerintah seyogyanya dipandang sebagai representasi campur tangan publik untuk memenuhi kebutuhan dan melayani kepentingan masyarakat banyak ("pedesaan").

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara historis dapat dikatakan bahwa kerusakan ALK di desa-desa (Boyolali) bagian hulu DAS Jratunseluna dinilai sudah sangat parah. Dibanding dengan DAS Jratunseluna, kerusakan ALK di desa-desa (Gunungkidul) bagian hulu DAS Bengawan Solo relatif tidak parah. Kemampuan masyarakat pedesaan mengurangi tekanan terhadap ALK dipengaruhi oleh kekuatan modal sosial yang berhasil diwujudkan oleh masyarakat pedesaan setempat. Semakin besar modal sosial bisa ditingkatkan, semakin besar pula kemampuan masyarakat pedesaan setempat mampu mengurangi tekanan terhadap ALK.

Desa yang memiliki modal sosial yang paling kuat adalah Desa Kedungpoh (PBD), kemudian disusul Desa Gondanglegi (PLK), Katongan dan Gunungsari. Pada masyarakat desa yang memiliki modal sosial yang relatif kuat maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya cenderung tinggi dan proses transformasi sosial-ekonominya berlangsung lebih cepat.

Program pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam pengelolaan agroekosistem lahan kering selama ini masih lebih menekankan pada pemberian bantuan material, dan kurang pada penguatan modal sosial setempat. Berkembangnya kegiatan ekonomi dan perbaikan pengelolaan ALK setempat lebih dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat mengalokasikan sumberdaya keluarga dan mengelola tata-nilainya untuk memperkuat modal sosialnya dari pada besarnya bantuan material dan pengetahuan teknologis yang diterima petani melalui keorganisasian proyek atau pemerintahan desa.

Beberapa indikator modal sosial dalam perbaikan pengelolaan ALK secara berkelanjutan adalah kuat atau lemahnya solidaritas, manajemen sosial, keorganisasian jaringan kerja, struktur sosial dan kegotong-royongan masyarakat setempat. Modal sosial relatif tajam bisa diamati di tingkat masyarakat kecil, atau dukuh. Jalinan *mutual trust*, *mutual respect* dan *mutual benefit*, masih ditemukan pada masyarakat dukuh; namun jalinan ini mulai memudar pada masyarakat tingkat desa. Oleh sebab itu, penguatan modal sosial, untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan, hendaknya dimulai dari masyarakat tingkat paling bawah, yaitu dukuh.

Sekumpulan elemen tata-nilai yang penting untuk penguatan modal sosial adalah rasa malu/harga diri, empati, kejujuran, amanah, altruisme, bervisi

ke depan dan rasional; sedangkan untuk penggerak kemajuan material adalah kerja keras dan rajin, hemat, gandrung inovasi, menghargai prestasi kerja, bervisi ke depan, dan rasional. Kedua gabungan tata-nilai, yaitu untuk penguatan modal sosial di satu sisi dan untuk penggerak kemajuan atau penguatan modal material di sisi lain, secara bersama ("sinergis") dibutuhkan dalam pengelolaan ALK berkelanjutan di pedesaan.

Pengembangan model penguatan modal sosial memerlukan latar belakang pemahaman yang mendalam tentang penguatan tata-nilai, keorganisasian masyarakat berbasis komunitas kecil, manajemen sosial yang sehat, kepemimpinan nonformal, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui penguatan modal sosialnya perlu diletakkan dalam bingkai transformasi atau pembangunan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terpeliharanya ALK di pedesaan perlu dijadikan indikator utama keberlanjutan pembangunan pedesaan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, A., F. Agus, dan D. Djaenuddin. 2000. Sumberdata Lahan Indonesia dan Pengelolaannya. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Altieri, M.A., P.M. Rosset and C.I. Nicholls. 1997. Biological Control and Agricultural Modernization: Toward Resolution of Some Contradictions. *Agriculture and Human Values*, (14):303-310, 1997. Kluwer Academic Publishers. Netherlands. <http://agroeco.org/doc/biocontradictions1.pdf>. [03/09/2004].
- Baum, F. 1999. Food, Social Capital and Public Health: Exploring the links. Key-note Address. The First Australian Conference on Food, Health and the Environment "Eating into the Future", Adelaide, 11-13th April 1999. fran.baum@flinders.edu.au.
- de Graaf, H.J dan Th. Pigeaud. 2001. Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI. Cetakan IV (Edisi Revisi). P.T. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Geertz, C. 1983. Involusi Pertanian: Suatu Proses Perubahan Ekologi di Indonesia. Bhratara Aksara. Jakarta.
- Hidayat, A., Hikmatullah, dan D. Santoso. 2000. Potensi dan Pengelolaan Lahan KERING Dataran Rendah. *Dalam* A. Adimihardja, L.I. Amien, F. Agus dan D. Djaenuddin (ed.) Sumberdaya Lahan Indonesia dan Pengelolaannya. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Keraf, A.S. 2002. Etika Lingkungan. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Kostov, P and J. Lingrad. 2001. Integrated Rural Development – Do We Need a New Approach?. 73rd Seminar on the European Association of Agricultural Economists, 28030 June 2001, ANCONA. http://nwu.fig.net/pub/morocco/proceedings/TS4/TS4_3_gur_et_al.pdf. [07/04/2004].

- Lewis, W.J., J.C. van Lenteren, S.C. Phatak and J.H. Tumlinson. 1997. A Total System Approach to Sustainable Pest Management. Proceeding of National Academy of Science, USA, (94):12243-12248, November 1997. <http://www.cpes.pechnet.ddu/lewis/lewist1.pdf>. [02/09/2004].
- Lombart, D. 2000. Nusa Jawa: Silang Budaya, Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris. Penerbit P.T. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Malvicini, C.F. and A.T. Sweetser. 2003. Modes of Participation (Experiences from RETA 5894: Capacity Building and Participation Activities II). Poverty and Social Development Papers No.6/July 2003. Regional and Sustainable Development Department, ADB. http://www.adb.org/Documents/Papers/Modes_ofParticipation/mode_part.pdf. [04/01/2005].
- Merton, R.K. 1962. Social Theory and Social Structure. The Free Press of Glencoe. New York.
- Mubyarto. 2002. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-ilmu Sosial. Yayasan Agro-Ekonomika. Yogyakarta.
- Odum, E.P. 1971. Fundamentals of Ecology. W.B. Saunders Company. Philadelphia.
- Parasuraman, N. 2004. Empowering the Rural Poor Through Information Access: Toward Sustainable Development.. Seminar on "Toward a New Paradigm of International Governance", Seoul, October 3-4, 2004. <http://www.student-pungwash.org/seoul2004/papers/parasuraman.pd>. [25/02/2005].
- Pelzer, K.J. 1982. Peran Manusia Mengubah Wajah Alam Asia Tenggara. *Dalam Sajoyo* (ed.). Ekologi Pedesaan: Sebuah Bunga Rampai. Penerbit C.V. Rajawali. Jakarta.
- Poplin, D.E. 1979. Communities: A Survey of Theories and Method of Research. MacMillan Publishing Co.Inc. New York.
- Prakash, S. 2000. Social Capital and the Rural Poor: What Can Civil Actors and Policies Do? in Social Capital and Poverty Reduction: Which Role for the Civil Society Organizations and the State? Social Human Science Sector of UNESCO. http://www.unesco.org/most/soc_cap_symp.pdf. [24/03/04].
- Prakash, S. 1997. Poverty and Environment Linkages in Mountain and Uplands: Reflection on the "Poverty Trap" Thesis. CREED Working Paper No 12, February 1997. Collaboration Research in the Economics of Environment and Development, IIED. London. <http://www.iied.org/docs/eep/creed12e.pdf>. [19/03/2004].
- Pranadji, T. 1986. Subsidi Pupuk, Dilema Kualitas, Hingga Organisasi Petani. Forum Ekonomi, V(38):18-21. ISEI. Jakarta.
- Pretty, J. 2003. Social Capital and Connectedness: Issues and Implications for Agriculture, Rural Development and Natural Resource Management in ACP Countries. CTA Working Document Number 8032. The ACP-EU Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA). <http://www.cta.int/pubs/wd8032/WD8032.pdf>. [24/01/2005].
- Purwadi. 2004. Jalan Cinta Syekh Siti Jenar: Catatan Mistik Kultural Menantang Hegemoni Para Wali. DIVA Press. Jogjakarta.

- Rachman, A.M.A. 1996. Traditional Information Capture and Environmental Knowledge. *Mimbar Sosek (Journal of Agricultural and Resource Socio-Economics)*, 9(2):36-52, Desember 1996. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Rambo, A.T. 1982. Human Ecology Research on Tropical Agro-ecosystems in South Asia. East-West Environment and Policy Institute. Honolulu.
- Sajogyo. 1974. Modernization without Development in Rural Java. A Paper Contributed to the Study on Changes in Agrarian Structure, FAO of UN, 1972-1973. Bogor Agricultural University. Bogor.
- Scherr, S.J. and S. Yadav. 1996. Land Degradation in the Developing World: Implications for Food, Agriculture, and the Environment to 2020. Food, Agriculture and the Environment Discussion Paper 4. International Food Policy Research Institute, Washington, D.C.
- Thijssse, J.P. 1982. Apakah Jawa Akan Menjadi Padang Pasir? *Dalam* Sajogyo (ed.). *Ekologi Pedesaan: Sebuah Bunga Rampai*. Penerbit C.V. Rajawali. Jakarta.
- Tjondronegoro, S.M.P. 1977. The Organization Phenomenon and Planned Development in Rural Communities of Java: A Case Study of Kecamatan Cibadak, West Java and Kecamatan Kendal, Central Java. Disertasi University of Indonesia (Unpublished). Jakarta.

